

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILK DESA(BUMDes) DI KEC.TANETE
RIAJA KAB. BARRU**

Oleh
ADI FIRMANSYAH
NIM 105730504814



Program Studi Akutansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018

**EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILK DESA(BUMDes) DI KEC.TANETE
RIAJA KAB. BARRU**

SKRIPSI

Oleh

ADI FIRMANSYAH

NIM 105730504814



**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**Program Studi Akutansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO

***Barang siapa yang memudahkan jalannya orang
menuntu ilmu, maka Allah memudahkan baginya
jalan ke surga.***

(H.R. Turmudzi)

***Kualitas seseorang bukan terletak
pada apa yang diucapkan tetapi pada apa yang
dilakukannya. Setiap kegagalan merupakan suatu
pijakan awal. Setiap langkah yang kau tempu mulailah
denga hal yang terkecil. Setiap langkah yang kau
lakukan harus didasari dengan cinta dan usaha***

(Adi firmansyah)

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT

Karya kecil ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda tercinta syahrul lattu dan Ibunda nurhayana , atas segala doa dan perjuangannya demi tercapainya keberhasilan studyku, yang tidak pernah lelah membahagiakan ku.

Adikku Elfiana, dan Dani atas motivasi yang diberikan sehingga selesainya skripsi ini Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 2014, senantiasa menemani masa-masa perkuliahan. Terimakasih atas persahabatan.

Almamaterku Biru Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas dan Efesiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kec. Tanete Riaja Kab. Barru

Nama Mahasiswa : ADI FIRMANSYAH
No. Stambuk : 105730504814
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 01 Safar 1440 H
10 Oktober 2018 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Agussalim HR, SE., MM
NIDN. 0911115703

Pembimbing II

Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA
NIDN. 0931126607

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



Ismail Hasulona, SE., MM
NBM. 903076

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA.CSP
NBM. 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ADI FIRMANSYAH**, NIM : **105730504814**, diterima dan diperiksa oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: /Tahun 1440H/2018M, Tanggal 10 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 Safar 1440 H
10 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif, SE.,M.Si.,Ak (.....)
2. Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
3. Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.CA (.....)
4. Saida Said, SE.,M.Ak (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903073

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan proposal yang berjudul “ *Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Terhadap Usaha BUMDES Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*”

Proposal yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Syahrul dan ibu Nurhayana yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tak pamrih. Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail badollahi SE , M.Si, Ak, Ca, selaku ketua program studi akuntansi universitas muhammadiyah makassar.
4. Bapak Dr .Agussalim HR. SE.,MM.selaku pembimbing I yang senang tiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Abd. Salam, SE,. M,Si. Ak,.Ca. selaku pembimbing II yang telah berkenan dan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak faidhul adziem. Ibu muttiarni, ibu idra wahyuni dan seluruh staf dosen serta asistem dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi akuntansi angkatan 2014 terkhusus nya ak 10 yang selalau belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk alhidayat, asfril, susanto.alfian.adek.ilham.dan ince muh yasin, herwin salim dan semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah membrikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukunganya sehingga penulis dapat merampumkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya , sungguhpenulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karna itu,kepada semua pihak utama nya para pembaca yang budiman ,penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-Mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utama nya kepada almamater kampus biru universitas muhammadiyah makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabilqul Khairat , Wassalamu “ Alaikum Wr. Wb.

Makassar 17 //08 / 2018

Penulis. Adi firmansyah

ABSTRAK

ADI FIRMANSYAH,2018.Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Tanete Riaja Kab, Barru. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.Di bimbing oleh Pembimbing I,.Agussalim HR, dan pembimbing II Abd Salam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Tanete Riaja Kab, Barru, Di 3(tiga) Desa yakni Desa Harapan,Desa Mattirowalie,Desa Lempang. Penelitian ini menggunakan data primer dari sumber data asli,metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan mengelola data-data yang di dapat, untuk melihat pengelolaan keuangan BUMdes di Kecamatan Tanete Riaja,Sehingga Dapat Di Simpulkan Bahwa Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Tanete Riaja Kab, Barru, belum Efektif. Pernyataan tersebut karna BUMDes Belum mampu untuk menjadikan Desa sebagai desa yang mandiri sebagaimana dari Visi Misi BUMDes Di Kecamatan Tanete Riaja Kab, Barru.

Kata kunci :Efektivitas Dan Efesinsi,Pengelolaan Keuangan.BUMDes.

ABSTRACT

ADI FIRMANSYAH, 2018. *Effectiveness And Efficiency Of Financial Management Of Bumdes In The District Of Tanete Riaja Kab, Barru.* Accounting Thesis Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Advisor I, Agussalim HR. and mentor II Abd Salam.

This study aims to determine the Effectiveness and Efficiency of Bumdes Financial Management in Tanete Riaja District, Barru, in 3 (three) villages namely Harapan Village, Mattirowalie Village, Lempang Village. This study uses primary data from original data sources, data analysis methods used in this qualitative descriptive study by managing the data obtained, to examine the financial management of BUMdes in Tanete Riaja District, so that it can be concluded that the effectiveness and efficiency of financial management Bumdes in Tanete Riaja District, Barru, has not been effective. This statement was due to BUMDes. It was not yet able to make the village an independent village as in the Bumdes Mission Vision in Tanete Riaja Kab District, Barru.

Keywords: *Effectiveness and Province, Financial Management. BASdes.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	8
1. Konsep Efektivitas dan Efisiensi	10
2. Pengelolaan Keuangan	11
3. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).....	14
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Hipotesis	31
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi dan waktu	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34

F. Instrument Penelitian	35
G. Metode Analisis Data	36
BAB IV. OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Objek penelitian	37
1. Desa Harapan	37
2. Desa Lempang.....	39
3. Desa Mttirowalie.....	42
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Anggaran dan Jenis BUMDes di Kecamatan Tanete Riaja	44
Kabupaten Barru.....	44
B. Bentuk BUMDes Di Kecamatan Tanete Riaja	48
1. BUMDes Harapan	48
2. BUMDes Lempang	50
3. BUMDes Mattirowalie	53
C. Analisis Penelitian BUMDes Di Kecamatan Tanete Riaja	54
Kabupaten Barru.....	54
1. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDes	54
Harapan	54
2. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDes	59
Lempang	59
3. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDes	60
Mattirowalie	60
D. Hasil Penelitian	66
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dan Dana BUMDes Tahun 2017 Yang Diakomodir	5
Tabel 2.1 Penjelasan Tentang Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1. Perbatasan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja	37
Tabel : 4.2.Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Di Desa Harapan Tahun 2016	38
Tabel : 4..3Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Harapan Tahun 2012-2017	39
Tabel : 4.4.Jumlah Penduduk Desa Harapan Tahun 2016 Berdasarkan Pekerjaan	39
Tabel 4.5. perbatasan desa lempang kecamatan tanete riaja	40
Tabel 4.6. Perbandingan Penduduk Perempuan Dan Laki-Laki	41
Tabel. 4.7. presentasi tingkat perbandingan mata pencaharian penduduk	41
Tabel 4.8. Perbatasan Desa mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja	42
Tabel .4.9.Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa mattirowalie Tahun 2014-2017	43
Tabel: 5.1 Modal Dan Jenis Usaha Bumdes Di Kecamatan Tanete Riaja.Kab. Barru.	47
Tabel : 5.2 Anggaran Pembelian Pupuk Saprodi	50
Tabel .5.3. Pemakai Hanphone Dan Tidak Memakai	52
Tabel : 5.4. Rincian Belanja Perlenkapan Pembangunan Wisata Lappa Laona Bumdes Desa Harapan.	55
Tabel : 5.5 Tarif Biaya Pengunjung Wisata Lappa Laona	56
Tabel: 5.6. Laporan Pendapatan Dan Penjualan Pupuk Bumdes Lembang.	60

Tabel : 5.7. Rincian Pembelian Dan Perlengkapan Usaha Penyewaan Molen Bumdes Mattirowalie.	61
Tabel : 5.8. Rincian Pembelian Sapi Dan Kelenkapan Pemeliharaan Pada BUMdes Mattirowalie.	62
Tabel:5.9. Transaksi Pembelian Dan Penjualan Gabah BUMdes Mattirowalie	63
Tabel : 5.10. Pembelian Mesin dan Perlengkapan Percetakan Batu Bata BUMdes Mattirowalie.	65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep	30
Gambar 4.1 tingkat perbandingan listrik pasca bayar	51

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat Provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat Provinsi akan tercapai jika Kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik.

Kemajuan ekonomi sebuah Kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menja min penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pem bangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pengembangan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program.

Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usahan yang mendorong perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi.

Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat salah satunya yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa.

Sejak 1993 pemerintah telah membuat program IDT instruksi presiden guna mengetaskan kemiskinan di pedesaan tertinggal pada masa Orde Baru. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran (*pnpm-pedesaan.or.id*). Selanjutnya diikuti program P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal) di tahun 1995 untuk mendukung dan meningkatkan implementasi IDT. Program P3DT mempunyai tujuan utama membangun sarana di pedesaan tertinggal.

Pemerintah mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di desa tertinggal tersebut selain bantuan modal dan bantuan teknis, pemerintah dengan pihak donor yang berasal dari Jepang dan Bank Dunia telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan program penanggulangan kemiskinan dengan membangun prasarana yang menyediakan akses dan prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal (<http://deputi5.tripod.com/>).

Kemudian pada tahun 1998 pemerintah meluncurkan program PPK (sekarang PNPM Mandiri). Program ini memfokuskan pada penyediaan dana

berputar (*revolving block grants*) dengan menggunakan lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat. Pararel dengan konsep pembangunan pedesaan dan dan program pengetasan kemiskinan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah membuat reformasi organisasi untuk menitikberatkan ketersediaan panduan pembangunan, supervisi dan pelatihan. Tugas tersebut merupakan implementasi empat fungsi birokrasi yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan jaringan usaha

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa,sesuai,Permendagri ini berkaitan langsung dengan BUMDes. Dalam arti diaturnya desain BUMDes secara detail, keputasan baru ini diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang

dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMdes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru terdapat 7 Kantor Desa diantaranya yaitu Desa Harapan, Desa Kading, Desa Lempang, Desa Libureng, Desa Lompo Riaja, Desa Lompo Tengah, dan Desa Mattirowalie. Di Desa Lompo Tengah dan Desa Mattirowalie di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, jika dilihat dari potensinya, besar karna ke tiga (3) desa memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keadaan tanah yang sangat subur untuk percocokan tanam, seperti padi, jagung, ubi. keadaan fisik tanah yang sesuai untuk pembuatan batu bata serta batu nisan. Serta aset desa dan potensi-potensi yang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barru terdapat program bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan BUMDes.

Sebagai bentuk aspirasi pemerintah untuk perkembangan ke 3 (tiga) desa di kecamatan tanete riaja di Kab, Barru maka pemerintah memberikan dana sebagai pembentukan BUMdes sebagai penampung ekonomi desa masyarakat

Tabel 1.1 Alokasi Dan Dana BUMDes Tahun 2017 Yang Diakomodir.

NO	Jenis usaha BUMdes	LOKAS		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		KECAMATAN	DESA	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata • Simpan pimjan • Usaha rumah tangga 	Tanete Riaja	Harapan	Rp135.000.000
2	<ul style="list-style-type: none"> • percetakan batu bata • pengemukan sapi • jual beli beras • penyewaan molen 		Mattirowalie	Rp200.000.000
3	<ul style="list-style-type: none"> • saprodi • penjualan PPOB 		Lempang	Rp62.0000.000

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat Desa, lembaga-lembaga dan perangkat Desa di ketiga (3) desa sudah mengetahui mengenai program BUMDES berdasarkan program pemerintahan sebelumnya. Namun sosialisasi yang kurang, muncul ketegagan dari masyarakat terutama dari pemerintahan desa untuk pembentuk BUMDES yang dianggap rumit. Oleh karena itu, melalui program penyuluhan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Lempang, Desa Kading dan Desa Harapan di

Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru di harapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendirikan BUMDES dan sarana untuk menjadikan desa Mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu penulisan dengan memilih judul **“Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Miilk Desa (BUMDes) Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dan Efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas dan Efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan akuntansi dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang terkait sehingga studi akuntansi selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsi pengetahuan bagi masyarakat tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kec.Tanete Riaja Kab Barru.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori.

1. Konsep Efektivitas dan Efisiensi.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome (hasil)*. Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Menurut Adisasmita (2011:170) efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah rendahnya (*spending well*) indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan (Sumenge 2013).

Sedangkan Adisasmita (2011:170) mengatakan bahwa efisiensi adalah suatu proses internal atau sum ⁸ yang diperlukan oleh organisasi untuk

menghasilkan satu satuan output karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input.

2. Pengelolaan Keuangan

Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), memimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar

sehingga pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007).

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang di harapkan dan pengawasan yang dekat. Dekat evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana

desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil berguna.

Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

a. Pengertian Badan usaha Milik Desa (BUMdes)

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:

- 1) hasil usaha desa.
- 2) hasil kekayaan desa.
- 3) hasil swadaya dan partisipasi.
- 4) hasil gotong royong.
- 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMdes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMdes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

b. Tujuan Berdirinya BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang

disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- 3) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- 2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan,
- 4) perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- 5) Industri dan kerajinan rakyat.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanism

self help dan *member-base*, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

c. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai

peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:

- 1) Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;

- 2) Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
- 3) Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;
- 4) Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama. Karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga menunjang program pembangunan di desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1) Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2) Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat

mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

3) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMS sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan.

Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BUMDes ini diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius

untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

6) Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes.

Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip transparansi dilaksanakan pengurus BUMDes dengan menyediakan informasi dan dipahami oleh anggota dan masyarakat.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Prinsip responsibilitas dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang serta melaksanakan usaha untuk memelihara kesinambungan usaha.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip independensi dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya mengelola usaha secara independen dan tidak ada dominasi usaha dan diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya dengan operasionalisasi kegiatan yang berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

B. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pada badan usaha milik desa adalah sebagai berikut:

Amelia Sri Kusuma Dewi (2014) Melakukan penelitian tentang "*Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*", Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.

Sumadi, dkk (2013) Melakukan penelitian tentang "*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*", dari hasil penelitian tersebut diketahui peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang.dan untuk melihat beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai beriku :

Tabel : 2.1 (penjelasan tentang penelitian terdahulu)

No	Nama peneliti/tahun	Judul	Metode penelitian	Pengertian
1	Ni Kadek Diah Candra Kartika, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni/2017.	Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan.	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif	BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa,
2	Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal/ 2013	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.	penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004.
3	Edy Yusuf Agunggunanto Fitrie Arianti/1 Maret 2016	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif.	BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk

				berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa.
4	Amelia Sri Kusuma Dewi (2014)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa	Penelitian yang dilakukan adalah peneliiian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif	BUMdes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan massyarakat desa.
5	Reza M. Zulkarnaen Mei /2016	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.	Kualitatif yag dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif.	BUMDES adalah lembaga ekonomi guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6	Rizka Hayyuna tahun 2010 sampai dengan tahun 2012	Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik).	Deskriptif .dengan pendekatan kualitatif.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Tulisan ini mendiskripsikan bagaimana bahwa strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDES dalam meningkatkan pendapatan desa.

7	RitnoH. Rondonuwu dan .Jantje J, Tinangon Desember 2015	berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis,dan diikuti degan metode kuantitatif.	Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan <i>outcome</i> dengan output.
8	Nazir/ Juli 2012	Peranan Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa BUMDes Dalam Mendorong Tumbuh Kembangnya Ekonomi Masyarakat Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.	Penulis menggunakan metode deskriptif.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka.
9	Yeni Fajarawati 2016.	Implementasi program badan usaha milik desa di desa pengadengan kcm,pengadeng	Metode deskriptif kuantitatif.	Bumdes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan yang kepemilikan modal dan pengelolaan nya di lakukan oleh

		an kab.tangerang		pemerintah desa atau masyarakat setempat.
10	Benny ferdianto/ 2016	Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

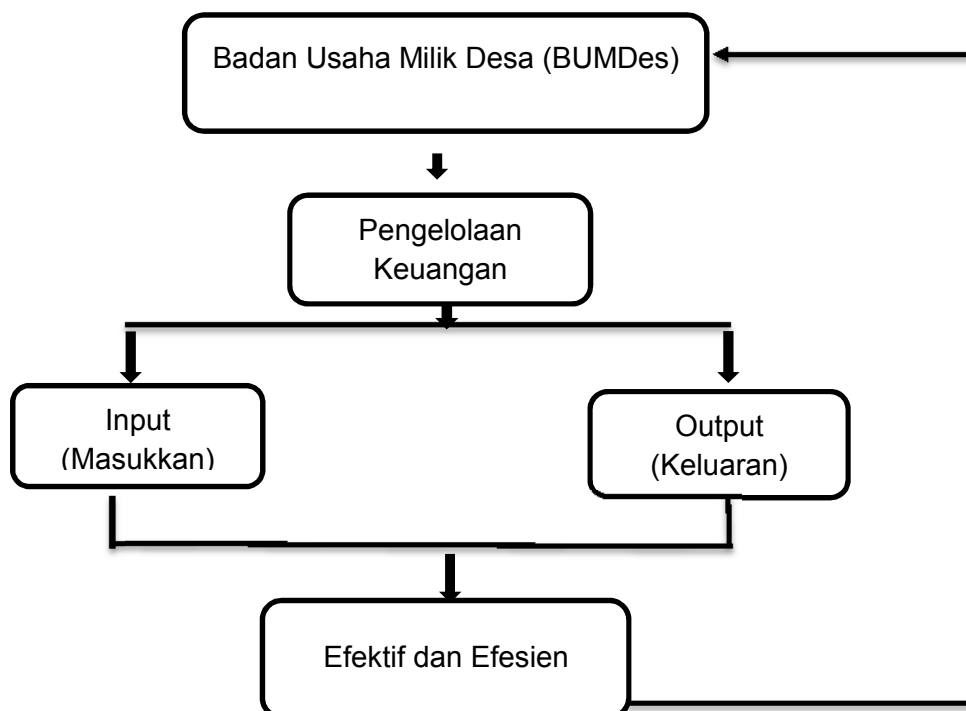
C. Kerangka Pikir

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan BUMDes adalah Perda Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 3

Perda tersebut menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMDes adalah:

1. Menggali dan memberdayakan sumber-sumber potensi desa agar lebih produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan Pendapatan Asli Desa;
3. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes di 3 (tiga) desa di Kecamatan tanete riaja kabupaten Barru, yang akan dikaji bagaimana tingkat keefektifan dan efesiensi nya. transparansi (*transparency*), akuntabilitas(*accountability*), responsibilitas(*responsibility*). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memiliki kerangka fikir mengenai ke-efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yaitu :



2.1 Bagan Kerangka Konsep

C. Hipotesis

Berdasarkan data di atas, sesuai dengan bagaimana cara mengetahui efektivitas dan evesiensi pengelolaan keungan dana BUMDes di Kec, Tanete Riaja , bahwa penulis hanya bisa menyimpulkan hanya 81% dana yang sudah terkelola , yang artinya bahwa hasil tersebut termasuk ke dalam kategori cukup efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai analisa efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan badan milik usaha desa (BUMDes) di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ini adalah menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. menurut Patton yang dikutip oleh lexi J Moloeng adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, adalah upaya mencari serta menata secara sistematis catatan hasil observasi, interview dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian dengan tujuan untuk mencari kebenaran data tersebut dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data deskriptif kualitatif.

kualitatif adalah teknik analisa data dengan menggunakan data-data yang berbentuk angka. Teknik ini biasa disebut dengan analisa statistik. model matematika, dan model-model tertentu lainnya.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini fokus penelitian yaitu analisa efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan badan usaha milik desa yaitu Desa Harapan , Desa Kading, dan Desa Lembang di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

C. Lokasi Dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Desa yang terdapat di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja (purposive), yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Kecamatan Tanete Riaja yang terdiri dari 3 (tiga) desa yakni desa harapan, desa lempang, desa kading.

Dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan tersebut sudah menerima dan mengalokasikan Dana BUMDes dengan lengkap diantara usaha-usaha lain karena pemerintahan Desa yang siap untuk mengalokasikan Dana BUMDes tersebut. Dan waktu yang sudah di tentukan daam penelitian ini yaitu 2 (bulan). Dimana dimulai pada tanggal 28/03/2018 sampai dengan waktu yang sudah di tentukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan Data yang digunakan ialah :

1. Data Primer yaitu data yang pertama kali di kumpulkan dan dicatat oleh peneliti .Sanusi (2014:104).Data primer dalam penelitian ini dimana didapatkan dengan memberikan kusioner kepada responden yaitu Desa yang mendapatkan dana BUMdes.Data primer ini dapat di peroleh dari individu yang bersangkutan dalam penelitian ini. Adapun cara peneliti memproleh data primer adalah sebagai berikut :

- a. Catatan hasil wawancara.
 - b. Hasil studi lapangan.
 - c. Data –data pengelolaan dana BUMdes.
2. Data sekunder adalah data yang di kumpulkan dan di peroleh dari organisasi atau peroangan, Data sekunder bentuk nya berupa sumber daftar pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta di peroleh dari literatur yang relevan seperti majalah.surat kabar.buku refrensi. jurnal. artikel dan website.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode dalam pengumpulan atau yang terdiri dari:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan seksama dan sistematis, yang kemudian di tindak lanjuti dengan pencatatan data secara cermat dan sistematis pada suatuobjek yang diteliti. Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cra melihat dan mengamati secara langsung dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

2. Tehnik Dokumntasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-halatau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasiadalah pengumpula data dengan cara melihat, membaca, mempelajari kemudian mencatat data yang sudah ada hubungan dengan objek penelitian.

3. Tehnik Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini tentang eektivitas dan efesinsi pengelolaan keunagan badan usaha milik desa(BUMdes) di kec. Tanete riaja kab. Barru. Menggunakan instrumen penelitian konsep eektivitas dan efesinsi. Dan instrumen nya sebagai berikut:

1. Metode Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara *Output* dengan *Input* atau dengan istilah lain *Output/unit input* (Mahmudi, 2007). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *Output* dengan *input*. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan sebagai berikut.

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

2. Metode Analisis Efektivitas.

Efektivitas merupakan pencapain tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan dengan pencapaian target output yang di ukur dengan cara menbandingkan output anggaran atau seharusnya dengan realisasi nya dan

untuk menganalisa tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target pengeluaran}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

G. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut di uraikan dalam bentuk kalimat- kalimat yang disusun secara terperinci dan sistematis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Objek Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan tanete riaja kabupaten barru di 3 (tiga) desa sebagaimana yang sudah diketahui bahwa desa tersebut sudah menerima anggaran untuk pengelolaan BUMdes. Dan keterangan objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Desa harapan.

1. Keadaan topografi

Desa Harapan merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah dan tinggi. Sebagian besar wilayah Desa Harapan adalah dataran yang tinggi, dimana hampir semua desa-desa yang berada di Kecamatan Tnete riaja merupakan dataran yang tinggi dan rata. Di sebelah timur dibatasi oleh Desa Gattareng Kabupaten Soppeng dan disebelah selatan berbatasan Desa Bacu-bacu Kecamatan Pujananting, sementara di sebelah barat Desa Libureng dan sebelah Utaranya Desa Anabanua.

Tabel 4.1. Perbatasan Desa Harapan
Kecamatan Tanete Riaja

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Gattareng	Mario Riwawo
Sebelah selatan	Desa Bacu-bacu	Pujanantin
Sebelah timur	Desa Gattareng	Mario Riwawo
Sebelah barat	Desa Libureng	Tanete Riaja

Sumber : Desa Harapan.

2. Luas dan penggunaan lahan

Desa harapan Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Harapan digunakan secara produktif, hal ini menunjukkan bahwa di Desa Harapan memiliki Sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas lahan berupa sawah teknis seluas 599,16 ha, dan yang lainnya berupa pekarangan/pemukiman 694,50 Ha, lainnya 3.131,69 ha, Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 4.2.
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan
Di Desa Harapan Tahun 2016.

Sawah (Ha)			Darat [Ha]				
Teknis	$\frac{1}{2}$ Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan Pemukiman	Hutan Rakyat	Tegal / Ladang	Hutan Negara	Lain-lainnya
599,16		554,66	6.945		874.75		3.131,69

Sumber : Data Desa Harapan 2017.

3. Keadaan Sosial Ekonomi.

Keadaan ekonomi sangat erat kaitan nya dengan sumber mata pencaharian penduduk desa harapan dan merupakan jantung kehidupan manusia, setiapmorang senantiasa melakukan dan mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian dan skill masing-masing dari jumlah penduduk 3919 Jiwa dan kepala keluarga sekitar 1145 sebagai berikut :

Tabel : 4.3.

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Harapan Tahun 2012-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	2012	2081	1928	4105	697
2	2013	2077	2018	4095	705
3	2014	2089	2014	4091	712
4	2015	3063	2016	4079	717
5	2016	1944	1980	3924	1145
6	2017	1949	1982	3931	1145

Sumber :desa harapan.

Keadaan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat desa harapan yang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.karyawan.pns.dan pedangan.dan lain sebagainya untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel : 4.4.

Jumlah Penduduk Desa Harapan Tahun 2016

Berdasarkan Pekerjaan.

Pekerjaan								
Pns	Swasta	Pedagang	Petani	Tukang	Buru Tani	Peternak	Jasa	Lainn ya
5,15, %	6,10%	9,84%	74,65 %	6,00%	9,50 %	75,60%	4,15 %	78,55 %

Sumber :desa harapan

2. Desa Lempang.

1. Keadaan topografi

Desa lempang merupakan salah satu desa dari 7 (tujuh)desa yang berada di kecamatan tanete riaja kabupaten barru,desa lempang terdiri dari atas 4(empat) perbatasan yakni desa aroppoe,lompo tengah,kading,pao-pao, batasan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5. Perbatasan Desa Lempang
Kecamatan Tanete Riaja.

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa aroppoe	Tanete rilau
Sebelah selatan	Desa lompo tengah	Tanete riaja
Sebelah timur	Desa kading	Tanete riaja
Sebelah barat	Desa Pao-Pao	Tanete rilau

Sumber :Desa lempang.

2. Luas Dan Penggunaan Lahan

Luas desa lempang sekitar 17,63 km² yang sebgain besar adalah daerah agraris yang dikelola oleh massyarkat setempat sebagai lokasi persawahan dan perkebunan.dan sebagian kecil penduduk yang beternak.desa lempang memiliki dataran rendah dan daerah perbukitan serta daerah lempang separuh nya daerah dataran rendah yang rawan banjir pada saat musim hujan.

3. Keadaan Sosial Dan Ekonomi.

Keadaan sosial dan ekonomi desa lempang tidk boleh lepas dari kegiatan sehari-sehari massyarakat setempat karna ini saling keterkaitan satu sama lainnya. Dimana jumlah penduduk desa lempang terdiri dari ats 699 kk dengan total jumlah jiwa 2501, berikut adlah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Perbandingan Penduduk Perempuan
Dan Laki-Laki.

Laki-Laki	Perempuan	Total
1097	1406	2501

sumber ;desa lempang 2017.

Keadaan ekonomi desa lempang kecamatan tanete riaja kabupaten barru dimana sebagian besar penduduk nya adalah petani. Peternakan.wiraswasta.karyawan.pns dan lain sebagainya berikut adalah tingkat perbandingan presentase jenis mata pencaharian penduduk desa lempang.

Tabel. 4.7. Presentasi Tingkat Perbandingan Mata Pencaharian
Penduduk.

Mata pencaharian	Presentase %
Petani	80%
Peternak	0,5%
Wiraswasta	0,5%
Pns	0,8%
Karyawan	0,2%

Sumber :desa lempang2017.

3. Desa Mattirowalie.

1. Keadaan topografi

Desa lempang merupakan salah satu desa dari 7 (tujuh)desa yang berada di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru,Desa Mattirowalie

terdiri dari atas 4(empat) perbatasan yakni Desa Bampae,Kading Ammerung,Libureng batasan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.8. Perbatasan Desa mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja.

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa bampae	Pujanangting
Sebelah selatan	Desa libureng	Tanete riaja
Sebelah timur	Desa ammerung	Pujanangting
Sebelah barat	Desa kading	Tanete Riaja

Sumber : Desa mattirowalie.

2. Luas Dan Penggunaan Lahan

Luas desa lempang sekitar 27,33 km² yang sebagian besar adalah daerah agraris yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai lokasi persawahan dan perkebunan.dan sebagian kecil penduduk yang beternak.desa mattirowalie memiliki dataran tinggi dan daerah perbukitan serta daerah mattirowalie separuh nya daerah dataran rendah yang memiliki area persawahan yang cukup luas.

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi.

Desa mattirowalie memiliki kegiatan masyarakat yang setiap harinya kebanyakan bersawah dan beternak ini dilihat karna desa mattirowalie memiliki dataran yang tinggi serta perbukitan yang memungkinkan masyarakat untuk beternak yang lebih baik. Tingkat kepadatan dan perkembangan kelangsungan kehidupan masyarakat sangatlah berlangsung dengan baik sebagaimana di liat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel .4.9.
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa mattirowalie
Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	2014	2081	1928	4105	697
2	2015	2077	2018	4095	705
3	2016	2089	2014	4091	712
4	2017	3063	2016	4079	717

Sumber :desa mattirowalie.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Anggaran Dan Jenis Bumdes Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat BUMDes wajib ada di setiap Desa, seperti dalam peraturan Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Maka berdasarkan UU tersebut, berdirinya BUMDes Hati Nurani yang dibentuk sejak tahun 2015 mampu menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat

Usaha ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus menjadi titik dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan serta sebagai usaha desa yang mampu membangun lapangan kerja yang luas. Dan mampu menjadikan desa yang mandiri, oleh karena itu di perlukan upaya yang sistematis untuk mendorong usaha BUMdes ini di kecamatan tanete riaja.

Harapan pemerintah kecamatan tanete riaja terhadap BUMDes harapan.mattirowalie .dan lempang agar mampu mengelola aset ekonomi di desa masing-masing secara profesional, sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi di kecamatan lain yang ada di kabupaten barru.

Kebijakan pemerintah untuk mendirikan BUMdes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi dan penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa di kecamatan tanete riaja agar pengembanaan usaha ini mampu memberikan nilai tambah terhadap pengelolaan aset desa yang ada di kecamatan tanete riaja. mengitergerasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki potensi dan posisi nilai tukar atau nilai tawar yang baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi yang kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikebangakan, menguatkan kelembangaan ekonomi desa, mengembangkan dan memajukan informasi pasar, dengan dukungan teknologi dan manajemen,

BUM desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai bentuk dan ragam jenis potensi. pendayagunaan [potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha desa di kecamatan tanete riaja di samping itu BUM desa juga sebagai sumbangsi peningkatan pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembagunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal

Memperhatikan potensi-potensi desa yang ada di Kecamatan Tanete Riaja khusus Di Desa Harapan, Desa Mattirowalie, Dan Desa Lempang pemerintah setempat memberikan himbaun untuk mengelola aset ekonomi tersebut menjadi suatu usaha yang dapat membangun perekonomian desa, setelah melakukan musyawarah dengan perangkat kerja pemerintah di kecamatan tanete riaja beserta aparat kerja desa maka pemerintah desa membentuk anggota BUM desa di setiap desa masing-masing, adalah sebagai berikut :

a) Desa harapan.

Ketua : Nuraeni.

Sekrtaris : Dewantara .

Bendahara : Fittriani Sp.d.

Pengawas

Ketua : Sukmawati.

Anggota : Wahyu.

Anggota : Ardi.

b) Desa Lempang.

Ketua :Abdul Kadir

Sekrtaris :Irwan Idris S,Pd

Bendahara :Hasnawati,S,Pd

Pengawas

Ketua : Anwar

Anggota :Hasanuddin

Anggota :Ela Karmila

c) Des Mattirowalie.

Ketua :Awaluddi, S. Pd.

Sekrtaris :Wahyuddin S, Pd.

Bendahara :Budiman S, Pd.

Pengawas

Ketua : Munir

Anggota : Suyuti

Anggota : Hasan

BUMdes di Kecamatan Tanete Riaja dalam pengelolaannya langsung dilakukan oleh anggota BUMdes masing-masing desa dalam rangka untuk

meningkatkan pendapatan asli desa adapun usaha serta pemberian modal usaha untuk masing-masing setiap BUMdes di Kecamatan Tanete Riaja adalah sebagai berikut :

Tabel: 5.1 Modal Dan Jenis Usaha Bumdes Di Kecamatan Tanete Riaja.Kab. Barru.

DESA	JENIS USAHA	MODAL USAHA	JUMLAH MODAL
BUMdes Harapan	Wisata lappa laona	Rp 120.000.000	Rp 138.000.000
	Simpan pimjam	Rp 15.000.000	
	Industri rumah tangga	Rp 3.000.000	
	Jumlah		
BUMdes Lembang	Saprodi	Rp 60.370.000	Rp 62.370.000
	Usaha PPOB	Rp 2.000.000	
	Jumlah		
BUMdes Mattirowalie	Unit penyewaan molen	Rp 20.000.000	Rp200.000.000
	Unit penggemukan sapi	Rp 49.000.000	
	Unit Jual Beli Gabah	Rp 35.000.000	
	Pencetakan batu bata	Rp 81.000.000	
	Peralatan percetakan batu merah.	Rp 15.000.000	
	Jumlah		

Sumber: Olah Data.

Data di atas merupakan jumlah pemberian dana untuk Badan Usaha Milik Di Desa(BUMdes) kecamatan tanete riaja.BUMdes Harapan sebesar Rp

138.000.000, BUMdes Lempang sebesar Rp 62.370.000, BUMdes mattirowalie Rp 200.000.00 .

B. Bentuk Usaha Bumdes Di Kecamatan Tanete Riaja.

1. BUMdes Harapan.

a) Wisata Lappa Laona.

Wisata Alam Lappa Laona adalah wisata yang memiliki pemandangan yang sangat indah dimana wisata tersebut terletak di perbatasan desa sadar kab.bone wisata lappa laona yang di kelola BUMdes ini memiliki potensi yang sangat membantu untuk perkembangan ekonomi massyarakat setempat.

Peneliti melakukan wawancara dengan massyarakat setempat bahwa *" usaha BUMdes ini sangat lah membuat perkembangan pembangunan aset potensi desa mampu membuat inovasi yang dapat menghasilkan dan meningkatkan pendatan desa agar menjadi desa mandiri ke depan akan lebih baik"*.

Wisata lappa laona memiliki beberapa tempat untuk merasakan keindahan nya serta tempat bermain orang dewasa dan tempat istirahat Untuk melepas kepenaan sejenak. Wisata lappa laona memiliki permainan serta tempat melihat wahana alam sebagai berikut:

- a) Flay fox.
- b) Gasebo.
- c) Tempat selfie.
- d) Dan tempat camping ground.

BUMdes desa harapan meruapakan bumdes yang sangat terkenal dengan flay fox nya sepanjang 270 meter, yang paling terpanjang di sul-sel.

b) Simpan Pimjan.

Unit usaha produk dan jasa yang di dirikan oleh BUMDes dibagi menjad dua yaitu simpanan dan pimjaman Berdasarkan hasil interview, bentuk simpanan yang ada yaitu tabungan masyarakat desa harapan dan tabungan usaha mikro. Tabungan ini di adakan dengan tujuan untuk memberi dukungan kepada masyarakat dalam meningkatkan \usahanya agar tidak kehabisan modal, serta membantu masyarakat untuk menabung untuk kebutuhan mendatang, seperti kebutuhan sekolah. Kedua bentuk tabungan tersebut dikelola oleh BUMDes dengan cara memutarakan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usaha BUMDes simpan pimjan desa harapan sangat membantu massyarakat yang tiba-tiba membutuhkan uang dengan bunga yang sangat rendah yaitu 1%.

Berdasarkan hasil interview dan observasi juga, masyarakat banyak tertarik dengan unit produk dan jasa simpan pinjam ini yang memiliki suku bunga yg kecil. selain membantu masyarakat untuk menabung, jug membantu masyarakat yang memiliki tekad memulai usaha.

c) Industri Rumah Tangga.

Berdasaran hasil observasi, ibu-ibu masyarakat Desa Harapan selain hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, mereka juga memiliki pekerjaan sampingan seperti bekerja di pasar, membuka usaha kelontongan, ada beberapa kelompok masyarakat memiliki usaha produktif rumah tangga yang sampai sekarang masih berjalan dan berkembang.

Usaha industry rumah tangga ini mampu menambah pendapatan tambahan, membuat masyarakat mandiri, juga menjadi khas atau oleholeh Desa harapan ibu hasnaeni selaku koordinator unit usaha rumah tangga

BUMDes Desa harapan menerangkan bahwa unit usaha rumah tangga yang dikelola oleh BUMDes merupakan usaha membantu masyarakat untuk memasarkan produk masyarakat agar bisa terjual.

Unit usaha rumah tangga ini juga bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Harapan yang kegiatannya memberdayakan Ibu Rumah Tangga. Dan jenis usaha rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Keripik singkong.
2. Kacang disko.
3. Keripik ubi.
4. Kacang sembunyi

2. BUMdes Lempang.

a) Saprodi.

Desa lempang adalah desa yang memiliki banyak dataran rendah dimana dataran tersebut lebih dominan dengan persawahan dan perkebunan sebagai langkah BUMDes lempang mengambil keputusan untuk menjual racun rumput. Hama,pupuk bersubsidi.

BUMdes harapan sangatlah membantu masyarakat desa harapan karna masyarakat merasakan dampak dari usaha tersebut masyarakat tidak perlu lagi dan susah mencari pupuk serta racun hama untuk pertumbuhan tanaman dan padi.dan rencana pembelian pupuk pertanian BUMdes lempang adalah sebagai berikut :

Tabel: 5.2 Anggaran Pembelian Pupuk Saprodi

Uraian	Banyak	Harga /unit	Jumlah
Usaha saprodi			
a. Urea	150 zak	Rp 95.000	Rp 14.250.000
b. Z A	100 zak	Rp 75.000	Rp 7.500.000
c. Ponska	20 zak	Rp 120.000	Rp 2.400.000
d. SP .36	20 zak	Rp 105.000	Rp 2.100.000
Jumlah	570 zak		Rp 26.250.000

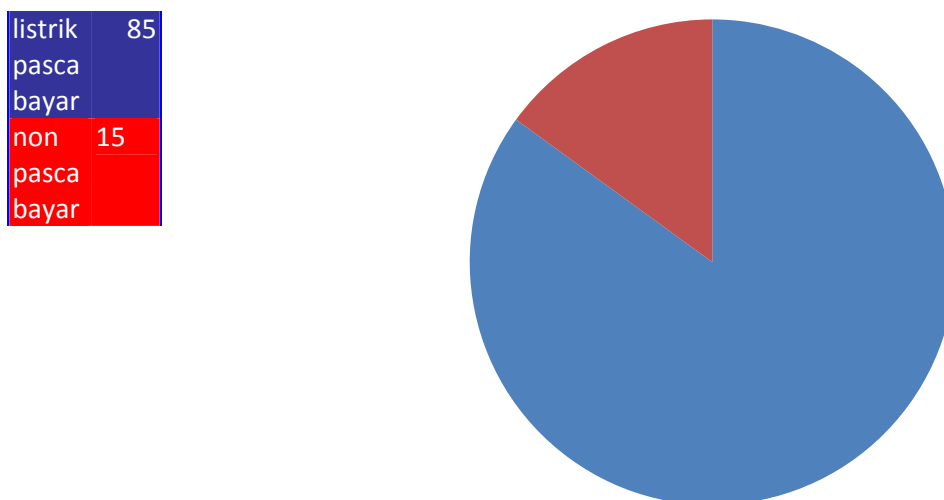
Data : BUMdes lempang.

b) Usaha jasa pembayaran PPOB

Usaha ini merupakan usaha BUMDes memberikan kontribusi dan mamfaat secara lansung kepada massyrakat karna pada saat ini massarakat tidak perlu susah mencari pembelian token listrik dan pulsa pasca bayar karna BUMDes lempang telah menyiadakan.

Berhubungan tingkat kondisi Desa Lempang yang rata-rata massyarakat, dan hampir setiap rumah telah memakai pulsa pasca bayar untuk kebutuhan sehari-hari. Baik dalam hal penerangan, memasak,maupun untuk pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain, dengan ini bahwa listrik adalah kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh massyarakat khusus nya bagian Desa Lempang termasuk dalam rumah tangga,pekerja dan industri rumah tangga serta, kebutuhan hidup. Serta untuk kegiatan kehidupan massyarakat.dan untuk meliat tingkat perbandingan rata-rata rumah yang memakai listrik pascabayar dan non prabayar di Desa Lempang adalah sebagai berikut:

Grafik 4.1 tingkat perbandingan listrik pasca bayar



Sumber :Data Primer

Data diatas menjelaskan bahwa jumlah massyarakat desa lempang sebanyak 85% dan non prabayar sebanyak 15%..kebanyakan dari massyarakat lebih beralih ke pasca bayar karna lebih memudahkan mereka untuk membayar tagihan listrik tiap bulan nya.serta kebutuhan massyarakat akan elektronik hanphone sebagai media komunikasi dan media sosial antar sesama manusi. Untuk melihat tingkat perbandingan pemakai hanphone dan tidak dapat diliahat sebagai berikut :

Tabel .5.3. Pemakai Hanphone Dan Tidak Memakai.

Keterangan	Jumlah (Rp)
Punya hanphone	92%
Tidak punya hanphone	8%

Data sekunder.

Dari data di atas menjelaskan bahwa kebanyakan dari massyarakat lempang sudah mempunyai hanphone sebagai media sosial utama. Dengan perbandingan 74%.

3. BUMdes Mattirowalie.

c) Unit Penyewaan Molen.

Sejalan nawai cita presiden RI, yaitu salah satu nya adalah percepatan pembagunan yang dimulai dari desa maka pemerintah mengelontarkan dana untuk desa masing-masing untuk melakukan percepatn pembagunan yang dimulai dari desa besar nya anggaran merupakan tanggung jawab kepala desa mattirowalie unatu menggunakan anggaran tersebut dengan sebaiknya baiknya untuk pembagunan dan kesehjahtraan massyarkat. Para kepala desa membentuk Tim pelaksana kegiatan(TPK) untuk melaksanakan kegiatan yang tersusun dalam rencana kegiatan yang telah disepakati melalui musyawarah.

Berbagai kegiatan ini dilakukan TPK mualai dari pembeuatan jalan tani ,rabat beton,pembuatang embung dan pembuatan bangunan untuk kepentingan umun .semua kegiatan ini membutuhkan alat untuk menunjang kinerja dan percepatan pembanguan dan pekerjaan mereka. Salah satu alat atau mesin yang di butuhkan adalah mixer molen.atau biasa di sebut molen.molen ini sangat lah membantu dan menunjang para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan nya dengan cepat.maka dari itu ketua pengurus BUMdes Mattirowalie bekerja sama dengan anggota TPK sebagai wadah untuk penyewaan molen yang nanti setiap pekerjaan pembagunan dan pengecoran ipraktrustur desa dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan.

b) Unit Penggemukan Sapi.

Salah satu potensi Desa Mattirowalie adalah massayrakat yang gemar memelihara sapi sehingga hampir semua massayrakat memelihara

peliharaan sapi, di samping cara pemeliharaannya yang sangat mudah dan harga jualnya pun sangat menjanjikan. Karena kisaran harga 3-4 tahun itu bisa mencapai 15-20 juta. Daging sapi merupakan kebutuhan pokok protein hewani yang sangat dibutuhkan masyarakat maupun di pasar. Kebutuhan akan daging setiap tahun permintaan konsumen semakin meningkat baik dalam pernikahan, syukuran, hari raya, dan warung penjual makanan atau bakso.

c) Unit Jual Beli Beras.

Salah satu Sumber Daya Alam Desa Mattirowalie di bidang pertanian sebagian dari masyarakat bergantung pada kehidupan ekonominya dari sektor pertanian. Beras adalah utama atau kebutuhan masyarakat yang primer sehingga tingkat kebutuhan beras tiap waktu pasti naik begitupun dengan tingkat perbandingan harga. Akan tetapi di Desa Mattirowalie belum mempunyai pabrik atau tempat menjual beras masyarakat. Cuma para tengkulak yang masuk dari daerah lain yang membeli beras atau gabah petani dengan harga relatif murah.

Sehingga petani merasa kesusahan untuk menjual gabah dan beras mereka dengan harga yang sesuai di pasaran. Maka dari itu pengurus BUMdes Mattirowalie berinisiatif untuk menampung kegiatan akses pertanian masyarakat setempat agar pengusaha lain tidak masuk untuk membeli hasil pertanian masyarakat.

d) Percetakan Batu Bata.

Desa Mattirowalie adalah desa yang hampir seluruhnya adalah dataran dan sebagian lagi adalah bukit dan gunung. Keadaan ini menunjang potensi-potensi dan berbagai jenis tanah yang baik untuk dikelola menjadi

batu merah. Setelah melakukan musyawarah antar sesama masyarakat desa mattirowalie dan anggota pengurus BUMdes serta masukan-masukan dari luar daerah.

Karna selama ini pembagunan pedesaan dan pembagunan rumah masyarakat dengan mengambil material batu bata di luar daerah Kabupaten Barru, ini merupakan bentuk bahwa batu merah di Kabupaten Barru terkhusus nya di desa Mattirowalie merupakan kebutuhan dalam setiap bangunan, sehingga Kepala Desa Mattirowalie memhimbau kepada anggota BUMdes untuk membuat rancangan dan tempat untuk pembuatan serta percetakan batu bata.

C. Analisis Penelitian.

1. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Bumdes Harapan.

a. Bumdes Wisata Lappa Laona.

Setelah melakukan penelitian di BUMdes Harapan peneliti memperoleh data realisasi anggaran biaya pembagunan wisata Lappa Laona adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.4. Rincian Belanja Perlenkapan
Pembagunan Wisata Lappa Laona
Bumdes Desa Harapan.

Uraian	Satuan	Harga	Jumlah
SEMEN 40KG	350	Rp 52.000,00	Rp 18.200.000,00
PASIR	12	Rp 650.000,00	Rp 7.800.000,00
BESI 6	110	Rp 32.000,00	Rp 3.520.000,00
BESI 8	60	Rp 18.000,00	Rp 1.080.000,00

BESI 10	100	Rp 38.000,00	Rp 3.800.000,00
BESI 12	45	Rp 63.500,00	Rp 2.857.500,00
BESI INBOX 5"	22	Rp 48.000,00	Rp 1.056.000,00
BESI INBOX 8"	22	Rp 52.000,00	Rp 1.144.000,00
PAPAN	31	Rp 42.000,00	Rp 1.302.000,00
BALOK	132	Rp 28.000,00	Rp 3.696.000,00
BATA MERAH	600	Rp 16.000,00	Rp 9.600.000,00
TALI	96	Rp 4.200,00	Rp 403.200,00
TALI BESI BAJA	26	Rp 68.000,00	Rp 1.768.000,00
PAKU 5	4	Rp 20.000,00	Rp 80.000,00
PAKU 8	10	Rp 22.000,00	Rp 220.000,00
PAKU 10	10	Rp 22.500,00	Rp 225.000,00
BAMBU	30	Rp 6.000,00	Rp 180.000,00
JARING	16	Rp 7.500,00	Rp 120.000,00
BATU GUNUNG	4	Rp 600.000,00	Rp 2.400.000,00
CAT AVIAN 5KG	8	Rp 76.000,00	Rp 608.000,00
CAT TEMBOK ALTEX	2	Rp 110.000,00	Rp 220.000,00
UPAH GAJI			Rp 32.000.000,00
JUMLAH			Rp 92.279.700,00

Sumber : Olah Data.

Setelah pembagunan wisata lappa laona selesai dan dapat dipunsikan dan di manfaatkan sebagaimana yang di program kan.wisata lappa laona memberikan tarif pajak pendapatan daerah dalam membantu perekonomian daerah dan tarif wisata lappa laona adalah sebagai berikut :

Tabel : 5.5 Tarif Biaya Pengunjung Wisata Lappa Laona.

Jenis kendaraan	Jumlah tarif
Mobil	Rp 10.000
Motor	Rp 2.000
Camping ground	Rp 10.000 /Motor

Sumber : BUMdes Harapan.

Dari tarif yang di tetapkan BUMdes Harapan dimana motor Rp 2.000 dan mobil Rp 10.000, untuk wisata lappa laona itu belum dapat beroperasi secara maksimal karna belum ada pembentukan anggota untuk pengawasan atau petugas yang berjaga dalam melakukan pemugutan tiket masuk wisata lappa laona ini di akibat kan karna belum siap nya tempat atau pos masuk wisata lappa laona. Serta belum sempurna nya atau belum terselesaikan nya pembagunan wisata lappa laona.

Berdasarkan tanggapan dari massyarakat pada peniliti pada saat wawancara oleh massyarakat setempat mengatakan:

Bahwa BUMdes Harapan yang memiliki unit usaha di bidang Wisata Lappa Laona merupakan Wisata pertama di Desa Harapan yang mampu mengelola sumber potensi desa untuk menjadi kedepan sumber pendapatan desa, akan tetapi pembangunan wisata Lappa Laona belum selesai atau belum dapat di operasikan, sehingga belum ada pendapatan untuk BUMdes Harapan. Dan semoga pembagunan wisata lappa laona bisa cepat rampun atau terselesaikan.

b. Simpan Pimjam.

Usaha simpan pimjam ini merupakan salah satu unit usaha BUMdes Harapan yg guna untuk memberikan dana atau suntikan materi terhadap massyarakat atau pengusaha mikro untuk memperbesar usaha nya tersebut dengan bunga yang kecil yaitu 1% dapat membuat massyarakat tertarik untuk

bertransaksi. Berikut adalah bentuk transaksi pemberian modal terhadap pengusaha mikro dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian modal terhadap bapak kamaruddin sebesar Rp 7.000.000 sebagai modal awal untuk usaha pembibitan jagung. Dengan waktu pembayaran selama 3 (Tiga) bulan.
2. Utang bapak Akbar pada tanggal 06 februari 2018. untuk modal usaha pembelian pupuk petani Desa Harapan sebanyak Rp 9.000.000.
3. Pak Akbar kembali menhutang 13 maret 2018 untuk pembelian pupuk cair dan racun rumput dan hama. Rp 1.200.000.

Transaksi di atas adalah bentuk dari pinjaman pengusaha untuk kelangsungan kegiatan usahanya dan BUMdes harapan mencatatnya dalam metode single entri adalah sebagai berikut :

Piutang	Rp 7.000.000
Kas	Rp 7.000.000

Realisasi	
Kas	Rp 7.070.000
Piutang	Rp 7.000.000
Bunga	Rp 70.000

Piutang	Rp 9.000.000
Kas	Rp 9.000.000

Realisasi	
Kas BUMdes	Rp 9.090.000
Piutang	Rp 9.000.000
Bunga	Rp 90.000

Piutang	Rp 1.200.000
Kas	Rp 1.200.000

Realisasi	
Kas BUMdes	Rp 1.212.000
Piutang	Rp 1.200.000
Bunga	Rp 12.000

Berdasarkan dari transaksi pinjaman di atas BUMdes Harapan dalam unit usaha simpan pinjam belum semuanya dilunasi oleh masyarakat yang berhutang karena belum jatuh tempo untuk bunga dari pinjaman nasabah yang ditetapkan.

Usaha Simpan BUMdes Harapan masyarakat Desa harapan setempat lebih mudah dan lebih terjangkau untuk masyarakat yang memerlukan modal, berdasarkan dari wawancara peneliti dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Harapan semenjak masyarakat mengetahui dan melakukan transaksi pinjaman ke unit usaha BUMdes Harapan.

Setelah wawancara oleh ketua BUMdes Harapan Ibu Hasnaeni mengatakan bahwa.Semenjak adanya usaha BUMdes Di Desa Mattirowalie masyarakat yang memerlukan modal untuk usahanya dan dan kebutuhan rumah tangga,kebutuhan pertanian. Dan lain-lain tidak perlu lagi ke Bank yang jaraknya agak jauh dan suku bunga yang terlalu tinggi. Sehingga dengan adanya BUMdes Simpan Pinjam di Desa harapan Masyarakat merasa terbantu,

2. Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Bumdes Lempang.

a. Saprodi.

Rencana kegiatan sebelumnya BUMdes lempang memilih usaha pertanian (saprodi) melihat peluang sangat baik jumlah kebutuhan pupuk yang ada di desa lempang sangat banyak maka dari itu BUMdes Lempang mengambil peluang itu. Selain memberikan input kepada BUMdes juga mempunyai output kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan pupuk untuk para petani.

Mengadakan kerja sama antara pengurus BUMdes lempang dengan penyalur pupuk dan juga bekerja sama dengan kelompok tani menyediakan pupuk. Sebagai tindakan awal BUMdes Lempang membeli pupuk pada permulaan pembibitan padi. Adapun rincian pembelian dan penjualan pupuk pada bulan 06/2108 di catat dengan menggunakan PSAK

Mikro dimana pembelian di catat terpisah dengan bentuk single entry adalah sebagai berikut:

Pembelian pupuk urea 150 zak	Rp 14.250.000
Kas	Rp 14.250.000
Pembelian pupuk ZA 100 zak	Rp 7.500.000
Kas	Rp 7.500.000
Pembelian pupuk ponska 20 zak	Rp 2.400.000
Kas	Rp 2.400.000
Pembelian pupuk Sp.36	Rp 2.100.000
Kas	Rp 2.100.000

Uraian di atas merupakan pembelian pupuk dari BUMdes Lempang yang jumlah total dari pembelian sebanyak Rp 26.368.000. untuk persediaan barang dagang BUMdes Lempang.

Penjualan pupuk BUMdes lempang dalam unit usaha saprodi yang menyediakan kebutuhan petani Desa Lempang, masyarakat langsung datang membeli pupuk untuk tanaman padi masyarakat adapun transaksi penjualan yang di catat dalam PSAK Mikro dimana penjualan di catat terpisah dalam metode single entri adalah sebagai berikut:

Kas	Rp 5.000.000
Penjualan	Rp 5.000.000
Kas	Rp 3.640.000
Penjualan	Rp 3.640.000
Kas	Rp 1.500.000
Penjualan	Rp 1.500.000
Kas	Rp 1.500.000
Penjualan	Rp 1.500.000
Kas	Rp 5.820.000
Penjualan	Rp 5.820.000
Kas	Rp 2.750.000
Penjualan	Rp 2.750.000
Kas	Rp 3.257.000
Penjualan	Rp 3.257.000
Kas	Rp 6.040.000
Penjualan	Rp 6.040.000

Penjelasan di atas merupakan transaksi penjualan pupuk selama bulan 08/2018 dengan total penjualan sebanyak Rp 28.000.000. di catat terpisah dengan yang lain nya, untuk meliat dari tingkat perbandingan dari pembelian dan penjualan pupuk atau barang dagan berdasarkan laporan yang diperoleh penulis dari BUMdes Lempang dalam unit usaha saprodi penulis melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan PSAK Mikro adalah sebagai berikut:

Tabel: 5.6. Laporan Laba Rugi Saprodi Bumdes Lempang menurut PSAK Mikro 06/2018.

No	Uraian		
1	Modal awal		Rp 28.000.000
2	Penjualan/pendapatan Penjualan	Rp 28.000.000	
	Hasil penjualan	Rp 28.000.000	
3	Harga pokok penjualan	Rp 26.368.000	
4	Beban operasional. Beban usaha	Rp -	
5	Laba	Rp 1.632.000	
6	Total modal berjalan		Rp 29.632.000

Sumber: Olah Data.

Tabel 5.6 hasil penjualan pupuk BUMdes Lempang memberikan keuntungan Rp 1.632.000. dan Bumdes lempang mampu memenuhi kebutuhan petani dalam sektor pertanian berdasarkan asumsi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan massryarakat setempat sebagai berikut :

Bagaimana tingkat pengaruh dan akses kemudahan pupuk pertanian pada Desa Lempang semenjak adanya BUMdes Lempang yang bergerak dalam Usaha Saprodi .dan bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keunagannya

Massyarakat mengatakan bahwa semenjak adanya BUMdes Lempang yang menjual pupuk pertanian, petani sangat lah terbantu dimana petani tidak terlalu susah untuk mendapatkan pupuk.tidak terlalu jauh dan harga juga terjangkau.

Dilihat dari tanggapan informan dan laporan keuangan BUMdes lempang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan nya cukup mampu memaksimal kan peluang-peluang ekonomi serta ,memenuhi kebutuhan petani Desa Lempang.

3. Efektivitas Dan Efesiensi Pengelolaan Keuangan Bumdes Mattirowalie.

a) Unit Peyewaan Molen.

Berdasarkan dari penelitian penulis mendapatkan data untuk pembelian dari usaha persewaan molen dan perlengkapan molen yang diberikan sebagai modal awal sebanyak Rp 20.000.000. berdasarkan transaksi yang di peroleh penulis pada saat penelitian membuat laporan pembelian dan perlengkapan usaha penyewaan molen sesuai PSAK mikro adalah sebagai berikut:

Tabel : 5.7. Pembelian Dan Perlengkapan Usaha Penyewaan Molen
Bumdes Mattirowalie sesuai PSAK mikro.

No	Uraian	Pengeluaran	Saldo
1	Kas		Rp 20.000.000
2	Pembelian molen (1)	Rp 10.500.000	
3	Oli 2 liter	Rp 70.000	
4	Perlengkapan molen	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 10.580.000	
	Sisa modal		Rp 9.420.000

Sumber : Olah Data.

Melihat data dari rincian pembelian molen dan perlengkapan persewaan molen tersebut tersisa modal Rp 9.420.000. unit usaha BUMdes mattirowalie baru memulai persewaan molen dengan sewa Rp 150.000 /hari. Persewaan molen baru di persewakan pada 1 minggu dan telah di kontrak oleh masyarakat setempat dan belum dibayar sewa molen tersebut.

b) Unit Pengemukan Sapi.

Pemberian modal pertama untuk unit usaha pengemukan sapi ini dari kantor desa sebanyak Rp 49.000.000. sesuai dengan perolehan data yang di dapatkan pada saat meneliti penulis mencatat laporan sesuai PSAK Mikro adalah sebagai berikut:

Tabel : 5.8.Pembelian Sapi Dan Kelenkapan Pemeliharaan Pada BUMdes Mattirowalie sesuai PSAK Mikro.

Tgl/2018.	Uraian	Debet	Kredit
12/04	Kas bank	Rp49.000.000	
17/05	Beli 2 ekor sapi .1 ekor/6.000.000		Rp 12.000.000
25/05	Beli 2 ekor sapi .1 ekor/7.100.000		Rp 14.200.000
27/05	Beli 1 ekor sapi		Rp6.500.000
27/05	Beli racun rumput		Rp 65.000
30/05	Vitamin ternak		Rp160.000
1/06	Garam 4 liter		Rp 20.000
05/06	Garam 4 liter		Rp 20.000
12/06	Garam 1 zak		Rp 170.000
22/06	Beli 1 ekor sapi		Rp 5.700.000
3/07	Pembuatan kandang. <ul style="list-style-type: none"> • Kayu/balok • Baut,paku,mata bor • Seng • Semen 10 zak 		Rp 1.100.000 Rp 300.000 Rp 2.500.000 Rp 480.000
	Jumlah		Rp 43.045.000

Sumber: Olah Data.

Dari rincian pembelian dan pembuatan kandang sapi telah kita liat bahwa jumlah biaya pembelian untuk unit usaha pengemjukan sapi sebanyak Rp 43.045.000 dan sisa saldo modal untuk unit usaha pengemjukan sapi sebanyak Rp 5.785.000.

Pemeliharaan pengemjukan sapi ini baru berjalan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu setelah modal di terima di awal bulan 4 namun keuntungan akan penjualan unit usaha pengemjukan sapi belum ada karna sapi belum siap untuk di jual kepada massyarakat dan pasar .

c) Unit Jual Beli Gabah.

Dalam unit BUMdes Mattirowalie pemerintah Desa memberikan modal sebagai usaha jual beli gabah sebanyak Rp 35.000.000 untuk menampung hasil pertanian massyarakat di desa mattirowalie dan belanja yang di rencanakan BUMdes Mattirowalie Rp45.000.000. adapun transaksi pembelian gabah di BUMdes mattirowalie adalah sebagai berikut :

Tabel:5.9. Transaksi Pembelian Dan Penjualan Gabah BUMdes
Mattirowalie.

Tanggal	Uraian	Pembelian	Penjualan
18/05/18	Beli gabah basah 2.000 kg	Rp 8.600.000	
19/05/18	Beli gabah basah 3.040 kg	Rp 13.072.000	
20/05/18	Beli gabah basah 3.100 kg	Rp 13.328.000	
8/06/18	Penjualan beras 5.047 kg/8000		Rp 40.374.000
11/06/18	Penjualan dedak gabah 576kg/		Rp 576.000
	Jumlah	Rp 33.054.000	Rp 40.950.000

Sumber: BUMdes Lempang.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan periode kelangsungan transaksi BUMdes Mattirowalie dalam jual beli gabah baru terkelola pada panen 3 (tiga) bulan yang terakhir adapun laporan laba rugi dan saldo laba yang di catat sesuai PSAK Mikro pada BUMdes Mattirowalie adalah sebagai berikut :

**Laporan Laba Rugi BUMdes Mattirowalie Unit Jual Beli Gabah
sesuai PSAK mikro untuk bulan 08/2018.**

Modal usaha		35.000.000
Penjualan		
Penjualan beras 5,047 kg		40.374.000
Penjualan dedak 576 kg		<u>576.000</u>
Pendapatan bersih		40.950.000
Pembelian	33.054.000	
Retur Pembelian	----	
Beban pokok penjualan		<u>33.054.000</u>
Laba Kotor		7.896.0000
Beban operasional		
Beban mesin	1.823.000	
Beban gaji	<u>700.000</u>	
		<u>2.523.000</u>
Laba Bersih		5.373.000
Total Laba Berjalan		<u>5.373.000</u>
Total modal 2018		40.373.000

Diliat dari laporan di atas menjelaskan bahwa dapat diliat tingkat keuntungan usaha jual beli gabah ini menandakan bahwa pengelolaan keungan

BUMdes Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja cukup efektif dan efisien dan untuk melihat tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dengan menggunakan rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{33.054.000}{34.500.000} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 0,956$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas tingkat efisiensi pengelolaan keuangan BUMdes di Kecamatan Tanete Riaja yaitu 0.956. ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan BUMdes Jual Beli Gabah Mattirowalie cukup Efisien seperti yang dikatakan (hasmiati 2014:44) bahwa jika di peroleh nilai kurang dari 100 % berarti efisien. sedangkan untuk melihat tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan BUMdes Mattirowalie dalam unit usaha jual beli gabah adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{biaya pengeluaran}}{\text{realisasi penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{33.054.000}{40.495.000} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 0.808.$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas bahwa tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan BUMdes Mattirowalie dalam unit usaha jual beli gabah dikatan belum Efektivitas berdasarkan dari (halim 2014:44) efisien apabila nilai rasio nya Lebih dari 1 atau 100%.

d) Mesin Percetakan Batu Bata.

Unit usaha BUMdes Percetakan batu bata di desa mattirowalie memakai teknologi yang modern dimana percetakan tersebut sudah memakai mesin percetakan batu bata sehingga tidak lagi memerlukan tenaga yang lebih banyak dan tidak menyita waktu yang lama untuk memproduksi batu bata yang lebih banyak dari pada memakai tenaga manual anggaran yg di pakai dalam pembelian perlengkapan mesin percetakan ini adalah sebagai berikut:

Tabel : 5.10. Pembelian Mesin dan Perlengkapan Percetakan Batu Bata BUMdes Mattirowalie.

No	Uraian	Jumlah
1	Mesin Percetakan Batu Merah	Rp 81.000.000
2	Peralatan Mesin <ul style="list-style-type: none"> • Conveyer • Drum • Tenda • Skop • Gerobak 2 • Cangkul 2 	Rp 2.750.000 Rp 200.000 Rp 75.000 Rp 90.000 Rp 500.000 Rp 50.000
3	Tanah 25 truck / Rp 455.000	Rp 11.385.000
	Jumlah	Rp 91.000.000

Sumber: BUMdes Mattirowalie.

Percetakan batu bata milik BUMdes Mattirowalie sudah mengelola dana sebesar Rp 91.000.000, sebagaimana rincian transaksi di jelaskan di tabel di atas.namun pada saat ini belum beroperasi sebagai mana mesti atau tidak

sesuai yang diinginkan karena terdapat masalah yang di hadapi pada saat produksi pertama dimana pada saat tersebut terjadi kegagalan pada tingkat ketahanan batu bata engga sesuai dengan dengan yang diinginkan atau tingkat uji kekerasan masih jauh dari standar nya sehingga belum mampu untuk di pasarkan atau dijual.

Kegagalan ini menjadikan usaha percetakan batu bata di BUMdes Mattirowalie berhenti untuk memproduksi sementara waktu. Setelah melakukan wawancara terhadap ketua BUMdes mattirowalie mengatakan

bahwa kegagalan ini adalah karna masih kurang nya bimbingan terhadap pihak atau orang yang berpengalaman dalam pembuatan batu bata dan sumber daya alam yang engga sesuai dengan kondisi daerah lain seperti di gowa.

D. Hasil Penelitian.

Berdasarkan dari analisis penelitian penulis meliat beberapa pengelolaan keuangan di BUMdes Kecamatan Tanete Riaja Kab, Barru bahwa pengelolaan keuangan di katakan efektif dan efesien sebagai mana yang katakan oleh Tinjaun Empiris adalah sebagai berikut :

Nordiawan dan Ayuningtyas (2014:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efesiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah rendahnya.

RitnoH. Rondonuwu dan .Jantje J, Tinangon Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

Berdasarkan dari tinjauan empiris di atas peneliti melihat bahwa dari beberapa jenis usaha BUMdes Di Kecamatan Tanete Riaja dalam konsep Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMdes Kecamatan Tanete Riaja, masih belum terlalu Efektif Dan Efisien karna pada dasarnya belum dapat mengelola potensi Desa dengan baik sebagai mana yang diungkapkan oleh peneliti terdahulu.yaitu dimana kehadiran BUMdes mampu mengelola Sumber Daya Alam dengan baik serta mampu menjadikan sebagai sumber pendapatan asli Desa untuk menjadikan Desa yang Mandiri di Kecamatan Tanete Riaja. Namun BUMdes Mattirowalie mampu memberikan tingkat ke efisien yang cukup yaitu 0.808.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Efisiensi Dan Efektifitas pengelolaan keuangan badam usaha milik desa di kecamatan tanete riaja kabuupaten barru.adalah sebagai berikut:

1. Rata – Rata tingkat efisien pengelolaan keunagan BUMDES Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, belum cukup Efisien aka tetapi ada perkembangan, karna diliat dari pengelolaan keuangan BUMdes di Kecamatan Tanete Riaja masih sangat lemah di mana diantar 3 (tiga) BUMdes belum mampu mencapai nawa cita atau program untuk menjadikan Desa yang mandiri serta meningkatkan pendapatan asli desa. serta mampu belum memaksimalkan sumber daya alam yang lebih baik.
2. Perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan pendapatan BUMde Lempang. BUMdes Mattirowalie. BUMdes Harapan belum efektif karna jenis usaha masing BUMdes di Kec. Tanete Riaja belum mencakup pendapatan atau belum mencapai target yang di tentukan.

a. Saran.

Berdasarkan dari analisa penulis dan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut ;

- a. Sumber Daya Alam yang berada di desa masing-masing agar semestinya di kelola dengan baik. serta pemanfaatan Sumber Daya

Manusia di optimalkan seperti mencari peluang-peluang ekonomi di pasararan.

- b. Kepala desa dan pengawas BUMdes di kecamatan tanete riaja harus bertanggung jawab penuh atas anggota nya.dan bertindak tegas terhadap anggota nya.
- c. Dalam laporan keuangan BUMdes Di Kecamatan Taete Riaja Kab, Barru untuk memakai laporan keuangan sesuai PSAK Mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Putu Meilia Utari. 2016. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Dana Pinjaman Bergulir Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terhadap Pendapatan Gabungan Kelompok Tani Ayodya Pura. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Agunggunanto,dkk, 2016. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha.Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Volume 3 Nomor 1, hal 67-81.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKD SP).2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Harun, Amran 2007. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. <http://jimfeb.ub.ac.id>. Diakses 25 Oktober 2015. Hal. 1.
- Kadek, Ni Diah CandraKartika., Dkk. 2017.efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a, (online), Vol 8, No 2
- Kurniawan,Ade Eka, 2016. "Peranan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten LinggaTahun 2015)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Umroh*.
- Moleong, L. (2013) .*Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M,Reza Zulkarnaen. 2016.pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (BUMdes)pondok salam kabupaten purwakarta, (Online) vol 5 no 1

- Muntahanah, S., dkk.2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. *Jurnal*. Purwokerto. Halaman 4.
- Maryunani, 2008, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB. (2007) Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES. Malang, PP RPDN.
- Setyowati, Endang. 2011. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Anggaran Belanja Langsung Barang Dan Jasa Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang*. Tesis. Universitas Jember.
- Santoso. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. *Tesis*. Surakarta. Halaman 29 dan 39.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(2), 115-131.
- Sofyan, A. (2015). Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. Keuangan Desa: Media Referensi dan Diskusi Keuangan Desa. <http://www.keuangandes.com/2015/09/prinsip-tata-kelola-badan-usaha-milik-desa/>. Accessed July 20, 2016.
- Wijanarko, Agung Septian.2012.*Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandangkrajang Kec. Kemilagi Kabupaten Mojokerto*.Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Pembangunan Nasiona” Veteran”.
- Wida. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Siabu Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.*Skripsi*. Jember. Halaman 11 dan 13.
- Willy Wirasamita. 2014. Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan.(<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>).Diakses

tanggal 12 April 2017).Peraturan menteri dalam negeri no. 39 tahun2010 tentang badan usaha milik desa.

Republik Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

_____ (2014). Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang pembentukan badan usaha milik desa .

_____ (2011). Permendagri nomor 21 tahun 2011 pedoman pengelolaan keuangan daerah _____ pusat kajian dinamika sistem pembagunan ,2017.

_____ (2008) perda nomor 04 tahun 2008 pasal 3(tiga) tentang tujuan dan maksud pendirian badan usaha milik desa.

_____ 2013 UU no.6 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.

_____ 2014 Pemdagri no.6 tahun 2014.pasal 87 dan 88 tentang desa.

_____ 2015 Pemdagri no.47 tahun 2015 tentang perubahan PP no.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, khususnya Bab Viii tentang BUMdesa pasal 132 terkait dengan pendirian BUMdesa.

_____ 2011 perda nomor 20 tahun 2011 tentang petunjuk teknis tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

_____ 2017 perdes lempang no 01 tahun 2017 tentang pembentukan kepengurusan badan usaha milik desa lempang.

_____ 2017 perdes mattirowalie nomor 01 tahun 2017 tentang pembentukan kepengurusan badan usaha milik desa mattirowalie.

_____ 2017 perdes harapan nomor 01 tahun 2017 tentang pembentukan kepengurusan badan usaha milik desa harapan.

<http://pendampingdesakampar.blogspot.com/2013>

<http://deputi5.tripod.com/>